

PERSEPSI PASIEN TERHADAP *INFORMED CONSENT* PEMBERIAN PIL KB DI PUSKESMAS CIAWI KABUPATEN BOGOR OLEH TENAGA KESEHATAN MENURUT PANDANGAN ISLAM

Ashilah Hamidah Assegaff¹, Bambang Poerwantoro², Zuhroni³

1. Mahasiswa, Fakultas Kedokteran, Universitas YARSI
2. Dosen, Fakultas Kedokteran, Universitas YARSI
3. Dosen Agama Islam, Universitas YARSI

ABSTRAK

Latar Belakang: Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008, persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah penjelasan secara lengkap mengenai Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. *Informed consent* memberikan perlindungan kepada pasien terhadap Tindakan Dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medis tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya serta memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan tindakan medis dimana pada setiap tindakan medis melekat suatu resiko. dan pada setiap tindakan medis melekat suatu resiko. Salah satu indikator utama dari kualitas pelayanan KB adalah pemberian konseling yang berkualitas kepada ibu *postpartum* sebagai calon akseptor KB yang menghasilkan *informed choice*, hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui konseling yang baik, lengkap dan dapat menggunakan media komunikasi serta pemberian informasi standar. Dalam pandangan islam, *informed consent* dalam penggunaan pil KB sebagai kegiatan muamalat yaitu *akad* dan harus memenuhi prinsip hukum Muamalat Islam.

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pasien mengenai *informed consent* pada pemberian pil KB di Puskesmas Ciawi dan untuk mengetahui pandangan Islam mengenai *informed consent* dan pemberian pil KB di puskesmas ciawi

Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dari hasil kuisioner. Sampel dipilih menggunakan metode non random sampling dengan consecutive sampling, sebanyak 50 pasien yang masuk kriteria inklusi dan eksklusi diikutsertakan dalam penelitian ini.

Hasil: Hasil penelitian di Puskesmas Ciawi menunjukkan bahwa permintaan persetujuan dilakukan kepada pasien secara lisan (secara lengkap dan sesuai PERMENKES oleh dokter atau petugas kesehatan) dan tingkat penerapannya sebesar 89,1% . Semua pasien 100% mendapat penjelasan tentang tujuan pemakaian pil KB, namun 20% tidak paham sepenuhnya dengan *informed consent* yang diberikan oleh petugas kesehatan.

Kesimpulan: : Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pasien sudah diberikan *informed consent* sesuai PERMENKES, tetapi pemahaman responden dengan penjelasan yang diberikan masih kurang. Dalam pandangan Islam *informed consent* pemberian pil KB boleh dilakukan karena telah terpenuhinya ‘Aqid (pihak-pihak yang berakad), Mahallu al- ‘aqdi (objek akad), Maudhu’u al- ‘aqdi (tujuan akad) dan sigat al- ‘aqdi (ijab dan Kabul).

Saran: Pasien sebaiknya lebih mendengar dan memahami penjelasan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan dan institusi terkait sebaiknya lebih meningkatkan *informed consent* dengan mengikuti peraturan yang ada, dan disesuaikan dengan pendidikan terakhir pasien sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih memuaskan.

Kata kunci: Persepsi, *Informed Consent*, Pil KB

**PATIENT'S PERCEPTION TOWARDS INFORMED CONSENT OF BIRTH
CONTROL PILLS DISTRIBUTION BY HEALTH CARE PROVIDER AT
CIAWI COMMUNITY HEALTH CARE CENTRE IN BOGOR
DISTRICT ACCORDING TO ISLAMIC VIEW**

Ashilah Hamidah Assegaff¹, Bambang Poerwantoro², Zuhroni³

1. Student, Medical School, Universitas YARSI
2. Lecturer, Medical School, Universitas YARSI
3. Lecturer of Islam , Universitas YARSI

ABSTRACT

Background: According to the regulation of the health minister of the Republic of Indonesia number 290/Menkes/Per/III/2008, medical action approval is the approval given by the patient or the closest family after complete description regarding medical or dentistry action that will be conducted to the patient. Informed consent provides protection for the patient against the medical action that is actually unnecessary and medically has no basic justification performed without the patient's knowledge as well as gives legal protection for doctor regarding the failure and the risk attached to each of medical actions. One of the main indicators of quality of family planning service is awarding a good quality counseling to the postpartum mothers as candidate of family planning acceptors producing informed choice, it can only be obtained through a good, thorough counseling, and the use of communication media and the distribution of standard information. In the Islamic view, informed consent in the use of birth control pills as a muamalah activity which is contract (akad) and must abide by the law of Islamic muamalah principles.

Aim: The purpose of the study is to know the patient's perception towards informed consent in birth control pills distribution at Ciawi Community Health Centre and to know Islamic view towards informed consent and birth control pills distribution at Ciawi Community Health Centre.

Methods: This research is a descriptive study which uses primary data from answers of questionnaire. Sample was chosen using non random sampling by consecutive sampling, wherein all 50 patients that is eligible according to the inclusion and exclusion criteria are taken into the study.

Result: The result of the study at Ciawi Community Health Centre indicates that approval request is conducted orally to the patient (in full and accordance with PERMENKES by doctors or health workers) and the level of implementation is 89,1 percent. 100 percent of the patients obtain the description of the purpose of birth control pills usage, yet 20 percent do not fully understand informed consent given by health care providers.

Conclusion: The results of the study show that most patients have been given informed consent in accordance with PERMENKES yet the respondents understanding with the description given is still lacking. In the Islamic view, the informed consent of the birth control pills distribution is allowed to be conducted because it has fulfilled the 'akid' (akad doers) mahallu al aqdi (the object of akad), maudhu u al aqdi (the purpose of the akad) and sigat al aqdi (akad and kabul).

Advice: Patient should listen and understand the description given by health care providers. Health care providers and related institution should further enhance informed consent by following the existing rules and adapting with the patient's latest education so as providing a more satisfactory health service.

Keywords: Perception, Informed Consent, Birth Control Pills